

**TINDAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA
JABAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PRODUK DAN PEREDARAN PUPUK TIDAK BER SNI
DALAM LP : LP/1058/X/2019 DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN
KESESUAIAN**

Oleh :

Nama : **FAHMI FATHUR RAHMAN CARDANA**
NPM : **41151010130103**

LEGAL MEMORANDUM

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

LAW ACTION BY INVESTIGATORS OF POLDA JABAR ON THE ACTION OF CRIMINAL PRODUCTS AND THE DISTRIBUTION OF FERTILIZER FERTILIZER IN SNI: LP / 1058 / X / 2019 CONNECTED WITH LAW NUMBER 20 OF 2014 ON STANDARDIZATION AND ASSESSMENT OF FERTILIZER SNI IN LP: LP / 1058 / X / 2019 CONNECTED WITH LAW NUMBER 20 OF 2014 ON STANDARDIZATION AND ASSESSMENT OF FERTILIZER SNI

By:

***Name: FAHMI FATHUR RAHMAN CARDANA
NPM: 41151010130103***

LEGAL MEMORANDUM

To Fulfill One Examination Requirements To Obtain a Law Degree in the Law Study Program



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHMI FATHUR RAHMAN CARDANA

NPM : 41151010130103

Jenis Penulisan Tugas Akhir : *Legal Memorandum*

Judul Penulisan Tugas Akhir : **TINDAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA JABAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRODUK DAN PEREDARAN PUPUK TIDAK BER SNI DALAM LP : LP/1058/X/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

**FAHMI FATHUR R
41151010130103**

LEMBAR MEMORANDUM

Dari : FAHMI FATHUR RAHMAN CARDANA

Untuk : PENYIDIK POLDA JABAR

Perihal : **TINDAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA JABAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRODUK DAN PEREDARAN PUPUK TIDAK BER SNI DALAM LP : LP/1058/X/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Tanggal : JUNI 2020

Pembimbing

Dini Ramdania, S.H.,M.H.

Juni 2020

Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.

ABSTRAK

Pupuk anorganik termasuk komoditas yang dilindungi, untuk memproduksinya ada syarat-syarat tertentu atau standar yang harus dipenuhi sehingga Negara menetapkan bahwa pupuk anorganik adalah salah satu komoditi yang wajib mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia) tujuannya adalah agar pupuk anorganik ini benar-benar dapat menunjang produksi hasil pertanian menjadi bagus, hal ini diatur dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan serta peraturan perundangan lainnya. Seperti halnya dalam kasus ini pelaku memproduksi dan memperjualbelikan pupuk NPK merek MH 88 dan merek Berlian Ijo tanpa menggunakan Standar Nasional Indonesia, dimana hal ini akan sangat merugikan para petani yang menggunakan pupuk tersebut karena pupuk tersebut dibuat tidak dengan takaran yang semestinya. Pada kasus ini penyidik menerapkan Pasal 113 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Dan UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Perpres No.15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dan Permenrin No. : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik, tetapi penulis akan menganalisis apakah penerapan hukum oleh penyidik Polda Jabar terhadap pelaku tindak pidana persaingan usaha yang tidak mencantumkan label SNI pada produknya sudah tepat? dan tindakan hukum lain apakah yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana produk tanpa SNI?

Metode penelitian yang digunakan dalam legal memorandum ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitiannya hanya mengumpulkan data primer bahan hukum sekunder yaitu dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam suatu kasus yang sedang dalam penyidikan.

Penerapan Pasal 113 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Dan UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Perpres No.15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dan Permenrin No. : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik oleh penyidik Polda Jabar terhadap kasus ini kurang tepat seharusnya penyidik menerapkan juga pasal-pasal pidana dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Sedangkan tindakan hukum lain yaitu selain dari dilakukannya penangkapan, penyegelan , penyidik juga harus melakukan penarikan terhadap produk pupuk anorganik tersebut serta memberikan kewajiban pada pelaku untuk mengganti rugi pada korban yang menderita kerugian akibat menggunakan pupuk anorganik yang tidak ber SNI tersebut.

Abstrac

Inorganic fertilizer is a protected commodity, to produce it there are certain conditions or standards that must be met so that the State stipulates that inorganic fertilizer is one of the commodities that must have SNI (Indonesian National Standard). The goal is that this inorganic fertilizer can really support production good agricultural output, this is regulated in Law No. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, Industrial Law, Trade Law and other laws and regulations. As is the case in this case the perpetrators produced and traded NPK fertilizer MH 88 and Berlian Ijo brands without using the Indonesian National Standard, where this would be very detrimental to the farmers who used the fertilizer because the fertilizer was not made at the proper dosage. In this case the investigator applied Article 113 of Law No.7 of 2014 concerning Trade, Article 62 Jo of Article 8 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 120 of Law No.3 of 2014 concerning Industry and Emergency Law No. 7 of 1955 concerning Investigation , Prosecution and Justice of Economic Crimes, Perpres No.15 of 2011 concerning the Determination of Subsidized Fertilizers as Goods in Supervision. Dan Permenrin No. : 08 / M-IND / PER / 2/2014 Regarding the Application of SNI for Inorganic Fertilizers, but the author will analyze whether the application of law by West Java Regional Police investigators against business competition criminal offenses that do not include SNI labels on their products is appropriate? And what other legal actions are which can be applied to product offenders without SNI?

The research method used in this legal memorandum is to use the normative juridical research method because in his research he only collects primary data on secondary legal material, namely from the applicable laws and regulations and how they are applied in a case under investigation.

Application of Article 113 of Law No.7 of 2014 concerning Trade, Article 62 Jo of Article 8 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 120 of Law No.3 of 2014 concerning Industry and Emergency Law No. 7 of 1955 concerning Investigation, Prosecution and Judiciary Economic Crimes, Presidential Regulation No.15 of 2011 Regarding the Stipulation of Subsidized Fertilizers as Goods Under Supervision. Dan Permenrin No. : 08 / M-IND / PER / 2/2014 Regarding the Application of SNI for Inorganic Fertilizers by West Java Regional Police investigators in this case, the investigator should also apply criminal articles in Law No. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Meanwhile, other legal actions, aside from arresting, sealing, investigators must also make withdrawals of the inorganic fertilizer products as well as giving obligations to the offender to compensate victims who suffer losses due to using non-SNI inorganic fertilizers.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarkhatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada kita sekalian dalam melakukan aktifitas hidup keseharian, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk *legal memorandum* sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul *legal memorandum* yang penulis ajukan adalah : **TINDAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA JABAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRODUK DAN PEREDARAN PUPUK TIDAK BER SNI DALAM LP : LP/1058/X/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Pada akhirnya dapat terselesaikan tepat pada waktunya meskipun dalam prosesnya penulis mengalami berbagai kendala.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dini Ramdania , S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir penulisan *legal memorandum* ini yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Bapak Dr. Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H, selaku Dosen Wali;
9. Para dosen dan asisten serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Dadan Cardana dan ibu Hj. Yani Sri Mulyani juga buat istri tersayang Nina Yulita Fuji A. Md. dan anak penulis Alfani Mulky Fathur Rahman yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa yang tiada henti sebagai wujud kasih sayangnya agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakhatuh.

Bandung, Juni 2020

Fahmi Fathur

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

LEMBAR MEMORANDUM

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRAC

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....	1
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	4
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	5
A. Pasal 113 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	5
B. Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf F UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	5
C. Pasal 120 Dan Pasal 53 UU No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.....	7
D. UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.....	8
E. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.....	8
F. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk An Organik.....	9

G. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 24, Pasal 25 Dan Pasal 65 UURI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.....	10
H. KUHAP Pasal 38.....	15
 BAB III TINJAUAN TEORITIK TINDAK PIDANA PUPUK TIDAK BER SNI.....	17
A. Pengertian Dan Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Ekonomi.....	23
C. SNI.....	25
D. Hukum Perlindungan Konsumen.....	26
 BAB IV PENDAPAT HUKUM.....	29
A. Penerapan Hukum Oleh Penyidik Polda Jabar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persaingan Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label SNI Pada Produknya.....	29
B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Diterapkan Pada Pelaku Tindak Pidana Produk Tanpa SNI.....	34
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Rekomendasi.....	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP